

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bandung adalah kota terbesar ketiga dan merupakan Ibu Kota dari Jawa Barat. Kota Bandung merupakan kota yang memiliki keunggulan baik secara komparatif maupun kompetitif. Posisi kota yang strategis sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat, menjadikan kota Bandung sebagai pusat perekonomian. Tersedianya transportasi darat dan udara, memberikan kemudahan akses untuk berkunjung ke Kota Bandung, baik secara domestik maupun internasional. Selain itu, Kota Bandung sangat terkenal sebagai kota pariwisata, dengan berbagai penawaran di berbagai bidang pariwisata, seperti; wisata belanja, wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata *hobby* (minat atau kegemaran khusus), serta wisata teknologi dan arsitektur.¹

Kehadiran globalisasi menjadi alasan dan faktor utama bagi berbagai negara-negara di dunia untuk saling bekerjasama. Hal ini didasarkan pada saling bergantung dan saling membutuhkannya tiap-tiap negara terhadap negara lain, baik itu sumber daya alam, energi, informasi, teknologi, maupun perdagangan. Dengan adanya hubungan internasional yang merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu eksistensi sebuah negara dalam hubungan internasional. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain.² Diplomasi kekinian juga tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tapi juga suatu senjata multi-

¹Hendri Renola Fitri dan Faiysal Rani. “Implementasi Kerjasama Sister City Studi Kasus Sister City Bandung-Braunschweig (Tahun 2000-2013)”. (Jurnal transnasional Vol.5 No.1, Juli 2013) h.932.

² Sumaryo Suryokusumo, 2004, *Praktik Diplomasi*, STIH IBLAM : Jakarta, Hal.1 Dikutip oleh Stivani Sinambela. “Kerjasama Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional ‘Studi Kasus: Kerjasama Sister City Kota Medan dan Kota Penang’” (Thesis UMY. Yogyakarta. 2014) hal. 1.

dimensional yang digunakan dalam situasi dan lingkungan apapun dalam hubungan antarbangsa.³ Sehingga dapat dikatakan hubungan internasional saat ini ditandai oleh aktivitas-aktivitas diplomasi yang sangat kompleks.

Kondisi Kota Bandung dengan berbagai keunggulannya tersebut memudahkan Kota Bandung untuk bersaing dengan dunia global. Selain itu, adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah Kota Bandung untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah muncul sebagai aktor baru dalam konteks kerjasama dan hubungan internasional untuk mengembangkan potensi daerahnya, baik yang berupa potensi alam maupun manusia, untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu solusi meningkatkan potensi yang dimiliki oleh kota Bandung tersebut, adalah dengan mengembangkan *network* (jaringan kerjasama) pemerintahan. Tidak hanya kerjasama antar daerah otonom di Indonesia, tetapi juga kerjasama dengan daerah (propinsi, kabupaten, kota) di luar negeri. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional untuk saling bekerjasama, salah satunya adalah kerjasama *sister city* Kota Bandung dan Kota Suwon.

Dalam melaksanakan kerjasama *sister city* ini, Pemerintah daerah khususnya Kota Bandung berpayung pada peraturan-peraturan yang memberikan kerangka yang jelas bagi berlakunya aktifitas kerjasama internasional bagi Pemerintah daerah yang relevan bagi kepentingan pembangunan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan otonomi yang luas bagi Pemda untuk mengembangkan segenap potensi daerahnya guna mengakselerasi proses pembangunan di daerahnya.

Selain Undang-undang di atas, Kota Bandung membuat Peraturan Daerah untuk melandasi terselenggaranya kerjasama *sister city* tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

³ *Ibid.*

Kerjasama Daerah. Peraturan daerah ini memuat tentang prinsip, maksud dan tujuan kerjasama, ruang lingkup kerjasama, tahapan pelaksanaan kerjasama, persetujuan DPRD Kota Bandung, keadaan-keadaan yang memaksa dalam pelaksanaan kerjasama, pembiayaan dan hasil kerjasama, berakhirnya kerjasama, penyelesaian perselesaian dalam kerjasama, pelaporan kerjasama, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Perda Kota Bandung ini telah mencakup semua ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Kota Bandung.

Kerjasama Kota Bandung dan Kota Suwon ini berawal dari Pemerintah Kota Suwon yang berkeinginan membangun kerja sama *sister city* dengan Kotamadya Bandung, yang disampaikan melalui kedutaan besar RI di Seoul dan Dirjen Heln Departemen Luar Negeri. Lalu pada tanggal 5 Agustus 1996, kedua kota menandatangani *Letter of Intend* (naskah pernyataan keinginan bermitra kota). Hingga pada akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1997 di kota Suwon, Republik Korea dilakukan penandatanganan MoU oleh Walikota Bandung Wahyu Hamijaya dan Walikota Suwon Sim Jae Douk dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antar Kadin kedua kota.

Beberapa program atas kerjasama yang telah dilaksanakan kota Bandung dan Suwon adalah sebagai berikut :⁴

1. Delegasi bisnis Kota Suwon telah mengadakan pembicaraan dengan KADIN Kota Bandung pada Bulan Juni 2000, dimana pada saat itu Pengusaha Kota Bandung telah memberikan informasi tentang kegiatan bisnis dan ekonomi di Kota Bandung;
2. Kompetisi Persahabatan Sepak Bola Junior antara kedua kota;
3. Pada tahun 2004 Kota Suwon telah mengirimkan delegasinya ke Kota Bandung sebanyak 2 kali, dimana dalam kunjungan tersebut telah dibicarakan beberapa rencana dan langkah kedepan untuk merealisasikan berbagai program yang telah lama direncanakan oleh pihak Kota Bandung dan Kota Suwon;
4. KADIN Kota Bandung bekerjasama dengan Pemerintah Kota Suwon untuk membuka pusat informasi perdagangan, ekonomi dan industri di Kota Suwon;

⁴ Tim Penulis Laporan Sister City.2010. *Data Laporan Akhir Tahun Kegiatan 2010*. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung : Pemerintah Kota Bandung.

5. Pemerintah Kota Bandung dan Kota Suwon melaksanakan studi banding antar Pegawai Pemerintahan untuk mempelajari manajemen pemerintahan;
6. Bussiness Matching antara pengusaha Kota Bandung dengan pengusaha Kota Suwon;
7. Transaksi dagang antara pengusaha Kota Bandung dengan pengusaha Kota Suwon serta promosi produk-produk Kota Bandung;
8. Pembangunan Monumen Sister City Bandung-Suwon di Suwon;
9. Mengirimkan koki Kota Bandung untuk mengikuti “Food Festival” pada Festival Hwaseong di Suwon;
10. Kerjasama antara Universitas Maranatha Bandung dengan Hanshin Universty Suwon;
11. Pertukaran pemuda Suwon Youth Foundation tahun 2011 dan 2012;
12. Bantuan pembangunan MCK di Desa Sukamulya, Kecamatan Cinambo dari Kyonggi University dan bantuan alat-alat tulis tahun 2012;
13. Program Kelas Bahasa Korea di Universitas Maranatha sejak tahun 2011;
14. Rencana pembangunan fasilitas pendidikan di Desa Sukamulya;
15. Rencana pertukaran pelajar Kota Bandung ke Kota Suwon tahun 2013.

Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kerjasama antara kota Bandung dengan kota Suwon antara lain:

1. Kadin kota Bandung akan bekerjasama dengan Kadin kota Suwon untuk membuka pusat informasi perdagangan, ekonomi, dan industri di kota Suwon.
2. Pemerintah kota Bandung dan kota Suwon akan melaksanakan magang antar pegawai pemerintah untuk mempelajari manajemen pemerintahan.
3. Persib Bandung merencanakan mengadakan kerjasama dengan klub sepak bola Blue Wings Samsung.
4. Pemerintah kota Bandung bekerjasama dengan Samsung Industry merencanakan pembangunan pusat industri elektronik “Samsung City Valley” di kota Bandung.

Data diatas adalah sebagian data tentang program-program sister city Kota Bandung dan Kota Suwon. Dalam pelaksanaannya, adakalanya program-program yang direncanakan sebelumnya tidak terlaksana atau tidak tercapai. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan kriteria efektivitas untuk menentukan pasang surutnya kerjasama sister city Kota Bandung dan Kota Suwon dengan parameter yang digunakan adalah kegiatan sister city yang telah dilaksanakan.

Kerjasama Sister City Kota Bandung dan Kota Suwon ini dimulai dengan penandatanganan MoU pada tahun 1997, akan tetapi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 tidak ada program yang dilaksanakan diantara kedua negara yang artinya kerjasama ini mengalami surut. Lalu pada tahun 2000 mengalami kebangkitan yang ditandai dengan pembicaraan antara delegasi Kota Suwon dengan KADIN Kota Bandung mengenai kondisi perekonomian Kota Bandung. Sedangkan pada tahun 2001 tidak ada program kerjasama yang dilaksanakan dan kerjasama dilakukan pada tahun 2002 dengan pertandingan persahabatan sepak bola junior antar kedua kota. Lalu pada tahun 2003 kerjasama sister city ini kembali mengalami surut karena tidak ada program yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Pada tahun 2004 Kota Suwon mengirimkan delegasinya ke kota Bandung sebanyak 2 kali. selanjutnya di tahun 2005-2007 tidak ada informasi mengenai program yang dilaksanakan. Pada tahun 2008-2009 ada program terkait Sister City. Kerjasama sister city Kota Bandung dan Kota Suwon ini terus mengalami fluktuasi dari segi implementasinya, hingga pada tahun 2011--2015 kerjasama ini baru terlihat mengalami kemajuan yang signifikan dengan terlaksananya banyak program, diantaranya ada program kunjungan kerja delegasi Pemerintah Bandung ke Suwon pada tahun 2011, pada tahun 2012 ada program pertukaran pemuda dan beberapa kegiatan delegasi suwon di Bandung. Selanjutnya di tahun 2013 ada program kunjungan ke Samsung Electronic City, balai kota Suwon, museum Suwon dan berbagai tempat lainnya. Pada tahun 2014-2015 pun banyak kegiatan berupa kunjungan delegasi antar Kota Bandung dan Suwon, ada beberapa pertemuan resmi, kemudian festival budaya dan pertukaran pelajar. Dari gambaran program Sister City yang dilaksanakan antara Bandung dan Suwon ini banyak mengalami fluktuasi program, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kerjasama Sister City antara Bandung dan Suwon mengalami pasang surut dari tahun ke tahun.

Sampai saat ini kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Suwon masih terjalin dengan baik sesuai dengan MoU yang telah disepakati, namun

masih belum optimal dan terjadi pasang-surut dalam pelaksanaan kerjasamanya. Pasang-surutnya kerjasama ini menjadi poin yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan kerjasama ini mengalami pasang surut, sehingga penulis mengangkat judul “IMPLEMENTASI KERJASAMA *SISTER CITY* KOTA BANDUNG DENGAN KOTA SUWON TAHUN 1997-2015”.

B. Rumusan Masalah

Kerjasama *sister city* Kota Bandung dan Kota Suwon merupakan produk dari desentralisasi kebijakan Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah yang memunculkan aktor-aktor baru yang disebut Paradiplomasi. Dalam pelaksanaannya, kerjasama yang dilakukan oleh aktor-aktor baru tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pasang-surutnya implementasi kerjasama *sister city* Kota Bandung dan Kota Suwon dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2015?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surutnya kerjasama *sister city* Kota Bandung dan Kota Suwon.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merupakan rangkaian disiplin ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan di Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai pelaksanaan Hubungan internasional yang dilakukan oleh Unit Level dan *Interstate* pada suatu Negara, atau aktor Sub-Nasional. Khususnya dalam kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung

dengan Pemerintah Kota Suwon yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Bandung dan Kota Suwon serta dalam rangka untuk menjalin serta meningkatkan hubungan luar negeri antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lainnya di Dunia.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan dan informasi dan studi empiris bagi para akademisi ilmu hubungan internasional yang menaruh minat pada hubungan internasional yang dilakukan oleh *Non-State Actor*, *Unit Level*, dan *Interstate* pada suatu Negara dalam pelaksanaan Hubungan Luar Negeri yang dilakukan aktor paradiplomasi.

E. Studi Pustaka

Penelitian yang mengangkat tema tentang kerjasama *sister city* ini telah banyak dilakukan dengan berbagai macam fokus atau batasan masalah penelitian yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan studi pustaka oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ika Ariani Kartini (UGM,2012)	Kewenangan Penerapan Prinsip Public Good Governance Dalam Hubungan Internasional Melalui	Deskriptif Analitis	Pelaksanaan sister city telah sesuai instrumen telah sesuai hukum internasional dan telah mampu menerapkan prinsip <i>good governance</i> pada kalangan pemerintahan

		<i>Perjanjian Sister City (Studi Kasus Kota Bandung)</i>		daerah provinsi maupun kota sehingga tercapai kerjasama yang baik dan berkesinambungan.
2.	M. Priyudi Ekananda (UNPAS, 2014)	Dampak Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Suwon (Republik Korea) dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di kota Bandung (Periode 2008-2013)	Deskriptif	Telah diimplementasikan dengan baik sehingga berdampak kepada meningkatnya bidang pendidikan dan berkembangnya kebudayaan kedua kota.
3.	Stivani Ismawira Sinambela (UMY, 2014)	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kerjasama Internasional Studi Kasus Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang	Deskriptif	Kerjasama sister city antara kota Medan dan Penang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan diantara kedua belah pihak pemerintahan tersebut yang disebabkan Eksternal dan Internal Government Issues.
4.	Khoera Dara Fazra (UMY, 2015)	<i>Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan</i>	Deskriptif	dalam studi kasus kerjasama sister city Kabupaten Bogor dengan Nanning di

		<p><i>Kerjasama Internasional</i> <i>(Studi Kasus: Proses Kerja sama Sister City Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) pada tahun 2008-2015)</i></p>		<p>Republik Rakyat Tiongkok, menimbulkan fenomena baru bahwa pemerintah pusat tidak mengontrol secara penuh terhadap kerjasama internasional tersebut. Begitu pula dengan Nanning yang menjadi bagian dari negara Republik Rakyat Tiongkok, Nanning ibukota Provinsi Guangxi yang terletak di barat daya China yang berbatasan dengan Vietnam.</p>
5.	<p>Albert (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2011)</p>	<p>Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan Kerjasama “Sister City” Semarang-Brisbane</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor kompetensi SDM, (2) faktor funding sebaiknya ditanggung oleh kedua belah pihak dan dikelola oleh lembaga keuangan terkait, (3) faktor infrastruktur yang penting adalah komunikasi dan jalan raya, (4) faktor kelembagaan pemerintah, (5) faktor</p>

				masyarakat harus aktif dalam sister city dan (6) faktor negara mitra
--	--	--	--	--

Pada ketiga *litelatur review* diatas tentunya mempunyai kesamaan topik yaitu membahas tentang sister city. Namun ketiga literatur tersebut mempunyai fokus atau batasan masalah yang berbeda-beda. Literatur pertama yang ditulis oleh Ika Ariani Kartini pada tahun 2012 membahas mengenai kewenangan penerapan prinsip Public Good Governance dalam Hubungan Internasional melalui perjanjian sister city. Dalam penelitiannya Ika Ariani Kartini menjelaskan bagaimana pemerintah kota Bandung menjalankan kewenangannya apakah telah sesuai dengan instrumen hukum internasional dan telah mampu menerapkan prinsip good governance pada kalangan pemerintah daerah provinsi maupun kota sehingga tercapai kerja sama yang baik dan berkesinambungan dalam menjalankan kerjasama sister city. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa kerjasama sister city di kota Bandung telah sesuai instrumen, telah sesuai hukum internasional dan telah mampu menerapkan prinsip good governance pada kalangan pemerintah daerah provinsi maupun kota sehingga tercapai kerjasama yang baik dan berkesinambungan.

Literatur yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Priyudi Ekananda pada tahun 2014. Saudara Priyudi ini mengambil topik mengenai dampak dari kerjasama sister city kota Bandung dan kota Suwon yang dibatasi pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kerjasama sister city Kota Bandung dan Kota Suwon telah diimplementasikan dengan baik sehingga berdampak kepada meningkatnya bidang pendidikan dan berkembangnya kebudayaan kedua kota.

Literatur yang ketiga adalah dari Stivani Ismawira Sinambela pada tahun 2014 yang mengangkat tema kebijakan pemerintah daerah dalam Penataan kerjasama internasional pemerintah kota Medan dengan Penang. Hasil penelitiannya, yaitu Kerjasama sister city antara kota Medan dan Penang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan diantara kedua belah pihak pemerintah tersebut yang disebabkan Eksternal dan Internal Government Issues.

Literatur yang keempat adalah dari Khoera Dara Fazra (UMY, 2015). Hasil dari penelitiannya yaitu mengenai *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor dan Kota Nanning dalam melakukan kerjasama banyak dilaksaaka dan diambil alih oleh pemerintah daerah, dan pemeritah pusat tidak banyak mengambil wewenang dalam kerjasama Sister City kedua kota.*

Literatur kelima yaitu Albert (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2011). Hasil penelitian Albert menyatakan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dari Sister City Semarang-Brisbane, ada 6 faktor yaitu : (1) faktor kompetensi SDM, (2) faktor funding sebaiknya ditanggung oleh kedua belah pihak dan dikelola oleh lembaga keuangan terkait, (3) faktor insfrastruktur yang berperan adalah komunikasi dan jalan raya, (4) faktor kelembagaan pemerintah, dimana pemerintah merupakan titik keberhasilan terbesar dalam Sister City (5) faktor masyarakat harus aktif dalam sister city, dari semua pihak dan juga aktor pemerintahan dan (6) faktor negara mitra.

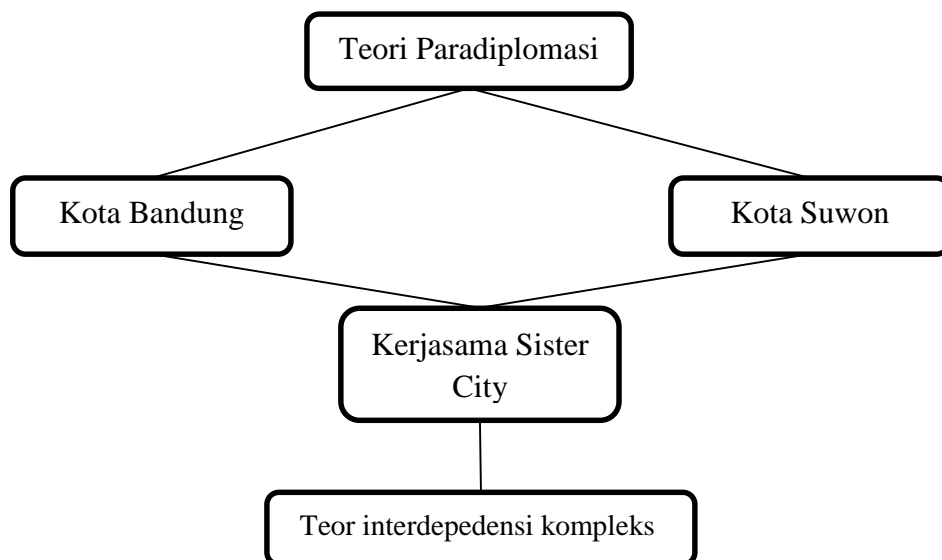
Kelima literatur review diatas memberikan masukan dan pandangan kepada penulis sekaligus memberikan wawasan kepada penulis untuk mencoba menemukan hal-hal yang baru dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Seperti yang sudah di singgung sebelumnya bahwa penelitian ini terfokus pada penganalisisan penyebab dari pasang-surutnya kerjasama sister city kota Bandung dan Kota Suwon dari mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2015.

F. Kerangka Teoritik

Untuk membahas permasalahan ini, penulis menggunakan teori paradiplomasi dan teori interdependensi kompleks. Dimana teori paradiplomasi ini digunakan sebagai pendukung dari terciptanya kerjasama *sister city* yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, teori interdependensi kompleks digunakan juga sebagai landasan bahwa kerjasama *sister city* ini terbentuk karena adanya persamaan karakteristik kedua kota yang bersangkutan. Teori interdependensi menurut Keohane dan Nye, “saling mengembangkan kerjasama” dan “beketergantungan” lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan Negara, namun dalam masing-masing kota tetap memiliki

keunggulan dan potensinya masing-masing. Keadaan yang seperti ini tidak akan membuat goyah suatu kota ketika kerjasama mengalami pasang atau surut. Apabila digambarkan, maka dapat dibentuk suatu skema sebagai berikut.

Gambar 1. 1. Paradiplomasi dan Interdependensi Kompleks



1. Teori Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang nyata dari implementasi kebijakan publik.

Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan suatu Negara, diplomasi regional tidak berusaha untuk mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, kepentingannya lebih untuk menunjukkan pada masalah yang lebih khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan Negara, dan berada pada pengawasan Negara, akan tetapi untuk mengembangkan daerahnya para aktor tersebut mempunyai kebebasan dalam menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai, dalam menjalankan mekanismenya, para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan Negara dan mengikuti sistem

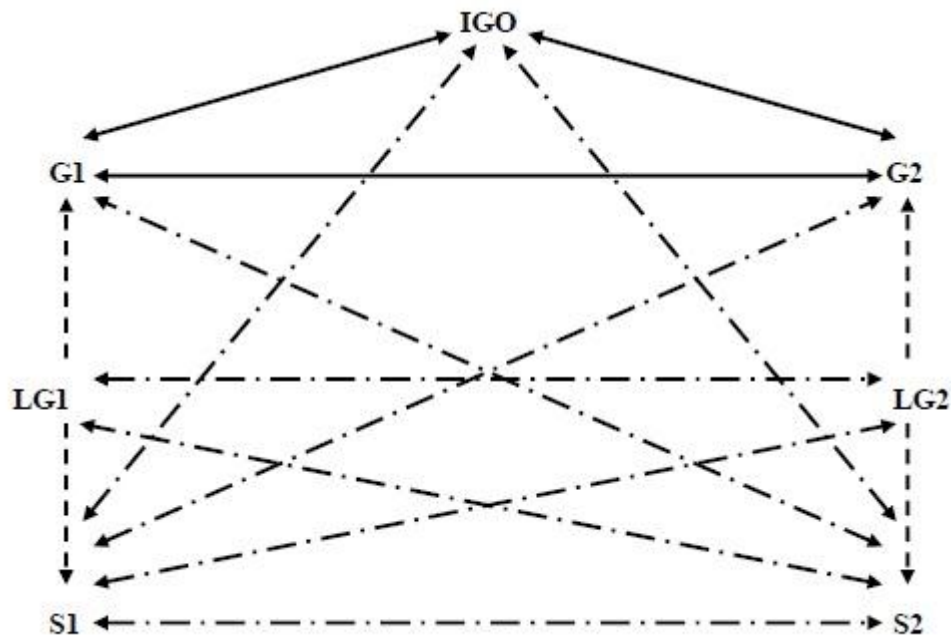
internasional yang berlaku yang menjadikan aktor Negara sebagai penghubung untuk terciptanya hubungan tersebut, hal ini disebut Paradiplomasi.⁵

Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau baik besar maupun kecil yang terbentang dari sabang sampai merauke mendukung kebijakan desentralisasi agar tetap dapat memakmurkan masyarakat dan pembangunan dalam segala bidang yang akan diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Otonomi ini adalah salah satu bentuk pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah di tiap provinsi dan kota untuk mengelola daerahnya masing-masing dengan tetap berpegang teguh terhadap Undang-Undang Dasar Negara. Dimana hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif efisien, dan berwibawa demi mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Munculnya “aktor baru” bernama pemerintah daerah (*local government*) mempengaruhi pengembangan model hubungan yang bersifat transnasional. Hal itu bisa digambarkan pada skema tiga berikut:⁶

⁵ Akbarizal AB. “Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Kerjasama Sister City dengan Kota Braunschweig Tahun 2000-2012. (Skripsi UNIKOM, Bandung, 2013.

⁶ Sidik Jatmika, 2001, Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf Publishing, Yogyakarta, Hal. 54.

Gambar 1. 2. Pola hubungan internasional yang bersifat transnasional yang melibatkan *Local Government* (Pemerintah Daerah) sebagai aktor dalam hubungan internasional⁷



Keterangan :

————— Hubungan politik antar negara

- - - - - Hubungan politik dalam negeri

- Hubungan transnasional

G : *Government* (Pemerintah Pusat)

LG : *Local Government* (Pemerintah Daerah)

S : *Society* (Masyarakat)

IGO : *Inter Government Organization* (Lembaga Internasional)

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Istilah '*Paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan pada tahun 1980-an oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah '*Parallel diplomacy*' menjadi '*Paradiplomacy*'. Menurut

⁷ *Ibid.* Hal. 54.

Aldecoa, Keating dan Boyer hal tersebut mengacu pada makna *'the foreign policy of non-central governments'*. Istilah lain yang digunakan oleh Ivo Duchacek (1990) untuk konsep ini adalah *'micro-diplomacy'*.⁸

Konsep paradiplomasi yang dikemukakan oleh Panavotis Soldatos dan dikembangkan Ivo Duchacek, kemudian menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah hubungan internasional oleh aktor sub nasional. Duchacek menjelaskan paradiplomasi dalam tiga tipe:⁹

- a. Tipe pertama adalah *transborder paradiplomacy*. Menunjuk pada hubungan institusional, formal maupun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun berbatasan langsung secara geografis. Ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah.
- b. Tipe yang kedua adalah *transregional paradiplomacy* yaitu hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda negara dan tidak berbatasan langsung, namun Negara di mana kedua pemerintahan sub nasional tersebut berada berbatasan langsung dalam satu kawasan.
- c. Tipe yang ketiga adalah *global paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia.

Sementara itu, Soldatos (1990), secara fungsional atau berdasarkan cakupan isu dalam paradiplomasi, membagi dua tipe paradiplomasi:¹⁰

- a. Tipe pertama adalah *global paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Sebagai contoh tipe paradiplomasi ini adalah kebijaksanaan

⁸ Crikemans, David, 2008 „Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?“, hal. 34, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium. Dikutip oleh Takdir Ali, 2013, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia, Yogyakarta. Hal.38

⁹ Ivo Duchacek. 1990. Dikutip oleh Stivani Sinambela. “Kerjasama Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional ‘Studi Kasus: Kerjasama Sister City Kota Medan dan Kota Penang’” (Thesis UMY. Yogyakarta. 2014) hal. 18.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 18.

yang diambil Gubernur New York dan Gubernur New Jersey yang melarang pendaratan pesawat-pesawat Uni Soviet di wilayahnya sebagai reaksi atas penembakan pesawat Korean Airlines. Mengingat pemerintah sub nasional biasanya terlibat dalam isu-isu politik tingkat rendah, tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi.

- b. Tipe kedua klasifikasi Soldatos adalah *regional paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Apabila isu-isu tersebut menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan langsung (*geographical contiguity*), Soldatos menyebutnya sebagai *macroregional paradiplomacy* sebaliknya bila komunitas tersebut tidak berbatasan secara langsung disebutnya sebagai *microregional paradiplomacy*. Lazimnya *regional paradiplomacy* ini menyangkut isu-isu politik tingkat rendah sehingga jarang menimbulkan kontroversi.

Dorongan bagi pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi dapat berasal dari lingkungan domestik baik dari negara maupun unit sub nasional itu sendiri, dan dari faktor-faktor eksternal/internasional. Faktor-faktor yang menjadi pendorong paradiplomasi meliputi:¹¹

- a. Dorongan (upaya-upaya) segmentasi baik atas dasar objektif (*objective segmentation*) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub nasional tersebut berada maupun atas dasar persepsi (*perceptual segmentation* atau *electoralism*) yang meskipun terkait dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.
- b. Adanya ketidakseimbangan keterwakilan unit-unit sub nasional pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (*asymmetry of federated/sub national units*).

¹¹ *Ibid.* Hal. 20

- c. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub nasional mampu mendorong pemerintah sub nasional untuk “melakukan ekspansi” perannya.

2. Teori Interdependensi Kompleks¹²

Teori interdependensi kompleks (*complex interdependence*) merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye dalam sebuah buku berjudul *Power and Interdependence* tahun 1977. Konsep mengenai Interdependensi ini lahir seiring dengan munculnya era globalisasi, yang pada dasarnya menyadarkan Negara-negara bahwa militer bukan lagi menjadi solusi tunggal dan dominan untuk mencapai tujuan atau kepentingan Negara, seperti; peningkatan perekonomian, penyelesaian konflik, maupun masalah sosial. Akan tetapi, berdasarkan kepada teori Interdependensi Kompleks Keohane dan Nye, “saling mengembangkan kerjasama” dan “beketergantungan” lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan Negara tersebut.¹³

Pada teori interdependensi kompleks Robert Keohane dan Joseph Nye, menekankan tiga hal dalam meningkatkan perekonomian, menyelesaikan konflik, maupun masalah sosial, yakni :

- a. Negara bukan satu-satunya aktor yang signifikan – terdapat aktor transnasional yang melintasi batas-batas Negara sebagai pemain utama;
- b. *Hardpower* bukanlah satu-satunya instrument yang signifikan – manipulasi ekonomi dan penggunaan lembaga-lembaga internasional adalah instrument dominan – dan kesejahteraan adalah instrument yang dominan;
- c. keamanan bukanlah tujuan yang dominan – kesejahteraan adalah tujuan yang dominan.

Interdependensi kompleks oleh Keohane dan Nye kemudian dijelaskan sebagai aliran liberalisme interdependensi model baru atau neo-liberal interdependensi. Meskipun militer tidak lagi menjadi instrument terpenting

¹²Hendrini Renola Fitri dan Faiysal Rani. *Op. Cit.* H.935-937.

¹³ *Ibid.*

bagi perdamaian dunia, namun sistem ini tidak memungkiri anarki internasional tetap ada dan nyata hingga saat ini. Akan tetapi, teori ini lebih menyarankan penggunaan *softpower* atau pendekatan dalam menghadapi anarki.

Berbagai macam jenis kerjasama internasional yang dijalin antar aktor adalah hal yang dinilai efektif saat ini untuk menjadi prioritas dalam meningkatkan perekonomian, menyelesaikan konflik, maupun masalah sosial.

G. Kajian Pustaka (Sister City)

Apabila ditelaah dari tata bahasanya *Sister City* terdiri dari 2 kata yakni *Sister* (saudari perempuan) dan *City* (Kota), dalam hal ini *Sister City* berarti Kota bersaudara dimana dalam perkembangannya yang berorientasi pada persahabatan dan kemitraan, hubungan kemitraan yang terjalin dalam konteks hubungan antar Kota dalam kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membantu dan menganut prinsip perlakuan yang sama atau *Reciprocal*.¹⁴

Kerjasama *Sister City* dapat diartikan sebagai hubungan formal antara Pemerintah Kota maupun Pemerintah Lokal lainnya yang mempunyai kedudukan setara yang melewati batas Negara, akan tetapi *Sister City* sendiri dapat berupa hubungan antara Negara dengan Kota yang tujuannya terhubung pada tujuan-tujuan internasional.

Kerjasama *Sister City* Sendiri terbentuk karena adanya persamaan kedudukan dan status administrasi, persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, persamaan permasalahan yang dihadapi, dan *komplementaritas* antara kedua pihak dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama dalam pertukaran kunjungan pejabat atau pengusaha, yang nantinya akan menimbulkan kerjasama dalam bidang barang dan jasa.¹⁵

¹⁴ Akbarizal AB. "Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Kerjasama Sister City dengan Kota Braunchweig Tahun 2000-2012. (Skripsi UNIKOM, Bandung, 2013).

¹⁵ Akbarizal AB. "Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Kerjasama Sister City dengan Kota Braunchweig Tahun 2000-2012. (Skripsi UNIKOM, Bandung, 2013).

Sister City merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang mempunyai peranan bagi perkembangan masyarakat di daerah dimana jalinan hubungan kerjasama yang tertuang dalam *Sister City* atau dapat disebut juga Mitra Kota dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah dan Masyarakat di Indonesia.¹⁶ Kerjasama *Sister City* merupakan hubungan kerja sama resmi jangka panjang antara pemerintah satu kota di suatu negara dengan kota lainnya di negara lain yang ditandai dengan adanya kesepakatan kerja sama secara formal (*Memorandum of Understanding* atau MoU) dan diakui serta disetujui oleh parlemen atau DPRD setempat. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, maka berdasarkan prinsip yang mengacu pada UU No.24/2000 tentang pembuatan perjanjian internasional, Pemda (baik Pemprov, Pemkab maupun Pemkot) telah ditegaskan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kualifikasi sebagai “Lembaga Pemrakarsa” untuk membuat perjanjian internasional. Menurut Departemen Luar Negeri RI (t.t.), pada umumnya kerjasama Kota *sister city* ini terbentuk karena sejumlah alasan, seperti: persamaan kedudukan dan status administrasi, persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, persamaan permasalahan yang dihadapi, komplementaritas antara kedua pihak yang dapat menimbulkan aliran barang dan jasa pertukaran kunjungan pejabat dan pengusaha.¹⁷

Menurut Villiers mengusulkan enam langkah siklis model atau kerangka konseptual kemitraan *sister city* dalam membentuk, mengelola, mempertahankan dan membangun kesuksesan kemitraan dan kemampuan beraliansi, yaitu :

- a. Strategi: kerangka manajemen dimulai dengan perumusan strategi aliansi. Sebelum mitra terlibat, sebuah organisasi memerlukan strategi aliansi untuk menguraikan pemikiran terkait visi dan tujuan untuk kemitraan, strategi untuk pemilihan mitra, untuk manajemen, dan

¹⁶ Akbarizal AB. “Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Kerjasama *Sister City* dengan Kota Braunchweig Tahun 2000-2012. (Skripsi UNIKOM, Bandung, 2013).

¹⁷ Nurul Insaeni. “Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan”. (Jurnal Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Global & Strategis Th.7 No.1. Jakarta, 2011) h. 130

cara menangkap pembelajaran (Villers, 2009). Kern (2001:12) menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat lokal perlu strategi, dimana dua strategi yang ditempuh adalah learning dan networking internasional. Dari strategi aliansi akan menjadi jelas jenis mitra yang harus dicari.

- b. Identifikasi: dalam mencari mitra strategis, kota atau komunitas biasanya mendekati lembaga perijodohan internasional dan mungkin juga didekati oleh kota-kota atau masyarakat lain dengan kemiripan permintaan. Permintaan tersebut hanya dapat dipertimbangkan jika kota tersebut ada dalam parameter strategi kerja sama.
- c. Mengevaluasi: pada tahap ini diperlukan pula investigasi due diligence dan studi kelayakan untuk mengenal sejarah kerja sama mitra yang potensial. Terdapat banyak kriteria yang berbeda yang digunakan untuk pemilihan mitra, kriteria dapat meliputi ukuran kota/populasi; kriteria geografis; sejarah politik; alasan filantropis; kepentingan sosial/umum; kepentingan ekonomi; universitas; kemiripan nama; asosiasi lokal (Zelinsky 1991).
- d. Negosiasi: tahapan ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu negoosiasi dalam pemilihan mitra, negoosiasi dalam perencanaan, dan negoosiasi dalam membuat kesepakatan (*Memorandum of Understanding*).
- e. Implementasi: tahap ini penting karena semua penilaian terhadap rencana yang telah disepakati telah dilakukan dengan baik sampai saat ini atau tidak. Setelah hubungan diimplementasikan, keberhasilan atau kegagalan perlu ditinjau secara berkala yang hanya dapat dilakukan jika pengukuran spesifik kinerja telah disepakati dalam tahap perencanaan.
- f. Kemampuan aliansi: merupakan titik keberlanjutan yang menyakini bahwa kota yang memperoleh lebih banyak pengalaman dalam praktik manajemen aliansi terbaik, maka akan lebih baik dalam hubungan kemitraan. Ini dibangun dan dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan aliansi, keterampilan (keterampilan kewirausahaan yang spesifik), pengalaman, dan pengembangan perilaku yang tepat, alat

aliansi yang tepat, sistem aliansi yang tepat, staf dan struktur organisasi, dan pelatihan/pendidikan.¹⁸

H. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesa yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah bahwa pasang surut pada implementasi kerjasama *sister city* Kota Bandung dan Kota Suwon terjadi pada tahun 1997 sampai tahun 2015 ini tidak terlalu signifikan, karena adanya faktor internal meliputi birokrasi, anggaran dan SDM, sedangkan faktor eksternal meliputi krisis global dan Paradigma Nasional.

I. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan suatu rancangan dan kerangka metode penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif analisis*, penelitian tersebut adalah penelitian yang secara menyeluruh, dimaksudkan untuk memberikan suatu pemahaman mengenai fenomena/kejadian tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus deskriptif, merujuk pada permasalahan dan *variabel* tersedia peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data dan informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung dan sumber-sumber lainnya dalam membahas permasalahan yang diteliti peneliti, sehingga validitas data yang nantinya akan diolah dapat teruji dan dipertanggung jawabkan secara akademis.

¹⁸ Villers (2000) dalam Gina Puspitasari Rohman dan Delik Hudalah “Evaluasi Keberhasilan Kerjasama Antar Kota Sister City Kota Surabaya”.(Jurnal ITB)

2. Lokasi dan Jangkauan

Lokasi penelitian secara langsung dilaksanakan di Bandung dan kantor Pemerintahan Kota Bandung. Jangkauan penelitian adalah sejak tahun 1997-2015.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepuustakaan dengan menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga data-data pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya.
- b. Dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu berbentuk tulisan ataupun foto/gambar yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai *sister city* antara Kota Bandung dan Suwon.
- c. Penelusuran Data melalui *Internet* dan *Media Online*, peneliti dapat menggunakan Media Internet untuk mengumpulkan berbagai informasi, data, dan referensi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
- d. Observasi, dalam tesis ini pengamatan juga dilakukan langsung dilapangan. Teknik pengumpulan observasi ini secara langsung mengumpulkan data terhadap berbagai pembangunan dan peristiwa yang merupakan hasil (*outcome*) dari kerjasama *sister city* antara kota Bandung dan Suwon.
- e. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya secara langsung, informan akan dipilih berdasarkan pelaku pemerintahan yang terkait dalam hal kerjasama *sister city* Kota Bandung dan Suwon.

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka dan kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Dinamika Kota Bandung dan Kota Suwon.

Bab III Implementasi Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan kota Suwon tahun 1997-2015

Bab IV Hambatan Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan yang didapatkan serta saran atau masukan mengenai masalah penelitian tersebut.